

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Hukum yang dimiliki Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelanggaran pengaturan skor adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap karena ada beberapa unsur yang sesuai antara pelanggaran pengaturan skor dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap tersebut.
2. PERBASI memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi apabila anggota PERBASI melanggar kode etik yang ditetapkan oleh FIBA dalam bola basket nasionalnya sendiri secara independen sejauh tidak menyampingkan hukum nasionalnya sendiri.
3. FIBA memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi dalam olahraga basket internasional.
4. Di dalam peraturan yang berlaku saat ini terlihat tidak adanya sinergi antara kewenangan yang dimiliki oleh KONI, BOPI, dan dalam menjatuhkan sanksi. KONI dan BOPI memiliki kewenangan untuk membentuk komisi Ad-Hoc dalam kasus yang terjadi di IBL pada tahun 2017 lalu, akan tetapi kedua lembaga tersebut tidak berperan aktif dalam melakukan kewajibannya untuk menegakan sanksi. Padahal kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga atau organisasi tersebut sudah jelas ruang lingkupnya. Karena seluruh lembaga atau organisasi tersebut memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi.
5. PERBASI sebagai induk olahraga basket Indonesia yang merupakan anggota dari FIBA tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Adanya beberapa pelanggaran seperti yang disampaikan di dalam kode etik FIBA tentang kesejahteraan pemain dalam mendapatkan gaji,

hingga pelanggaran pengaturan skor yang terjadi di IBL. Karena PERBASI tidak bersikap tegas dalam menanggulangi masalah yang terjadi. PERBASI tidak menjalankan kewajibannya di dalam pasal 7 ayat 3 AD/ART PERBASI, dimana berkewajiban untuk mengawasi dan membimbing setiap anggotanya untuk melaksanakan peraturan bola basket sesuai yang ditetapkan oleh FIBA.

6. IBL tidak menegakan hukumnya secara tegas karena pelaku tidak membayar denda yang harus dibayarkan dan tidak ada tindak lanjut atas denda tersebut yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap sanksi yang sudah diputus.
7. PERBASI dan IBL tidak transparan dalam menjatuhkan sanksi yang dikenakan kepada 2 Pemain Asing yang terlibat dalam Pengaturan Skor. Kepastian Hukum yang tidak diberikan kejelasan menimbulkan ketidakadilan yang merugikan 9 pelaku lainnya.

## 5.2 SARAN

1. Hukum Nasional harus memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan setiap organisasi non-pemerintah yang membantu pemerintah seperti BOPI dan PERBASI dalam bentuk Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga agar dapat dibedakan dengan jelas kewenangan setiap organisasi tersebut.
2. Dengan adanya aturan yang sudah ada sekarang, Indonesia harus memperbaiki pemetaan kedudukan yang harus dibuat yang meliputi tanggung jawab, kewenangan, serta kedudukan dan peran aktif yang dimiliki oleh setiap organisasi antaran organisasi satu dengan yang lain.
3. Indonesia harus merevisi Perundang-Undangan tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang dimiliki Indonesia dan menambahkan sanksi mengenai tindak pidana dalam lingkup olahraga agar menjamin kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan olahraga yang ada di Indonesia.

4. PERBASI dan IBL harus menegakkan kewenangannya dalam menjatuhkan sanksi yang tegas kepada Klub basket yang tidak melakukan tugasnya dalam hal kesejahteraan pemain.
5. Diperlukan komitmen dari setiap unsur yang terkait di dalam kegiatan olahraga basket, bersama dengan penegak hukum untuk menjalankan kegiatan olahraga dengan tegas, jujur dan adil sehingga pelanggaran pengaturan skor dalam olahraga basket dapat diberantas di Indonesia. Contoh nyata dari komitmen tersebut adalah perjanjian yang ditandatangani oleh setiap subyek yang berkaitan dengan olahraga basket dan menyetujui komitmen tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik*, (Refika Aditama, Bandung, 2012)

Hinca Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepak Bola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011)

Lutan, R. dan Muthohir, T. Cholik, *Olahraga dan Transformasi Nilai*, (Direktorat Pemberdayaan IPTEK Olahraga, Dirjen Olahraga, Depdiknas, Jakarta, 2001)

Rusli Lutan dan Sumardianto, *Filsafat Olahraga* ( Depdiknas, Jakarta, 2000).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986).

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press, Jakarta, 2015)

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

### 2. Jurnal

Butcher, R. and Schneider, A. "Fair Play as Respect for the Game". *Journal of the Philosophy of Sport*. Vol. XXV, Tahun 1998.

Danarstuti Utami, "Peran Fisiologi Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Indonesia Menuju Sea Games", *Jurnal Olahraga Prestasi*, Vol. 11, No. 2 Tahun 2006

Sarwono, "Nilai: Penipuan, Sportivitas, dan Etika Dalam Olahraga dan Pendidikan Jasmani", *Jurnal Phederal*, Vol.9, no.2 Tahun 2014

Leonardo V. P. de Oliveira, *Lex sportiva as the Contractual Governing Law*, *International Sport Law Jurnal*, 2017.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Penyupaan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia

#### 4. Regulasi Terkait di Luar Perundang-Undangan

*FIBA General Statutes 2017 edition*

*FIBA Internal Regulations Book 1 2017 edition*

*FIBA Internal Regulations Book 2 2017 edition*

*FIBA Code of Ethics*

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI 2014

Peraturan Ketua Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hukum Acara Badan Arbitrase Olahraga Indonesia

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI

Peraturan Pertandingan *Indonesian Basketball League (IBL) 2017*

*Declaration of the International Fair Play Committee, 2011*

*National Action Plan against Match-fixing in Sport, Ministry of Culture Norway, 2013*

#### 5. Website

Danang Adji Setyawan, *Fair Play dalam Olahraga*,  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=481820&val=9745&title=FAIR%20PLAY%20DALAM%20OLAHRAGA>, (diakses tanggal 16 November 2018 pukul 13.00)

Hukum Online, *Hukum Olahraga Harus Jadi Lex Specialis*,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b77bed0a91f8/hukum-olahraga-harus-jadi-ilex-specialis>, (diakses tanggal 16 November 2018 pukul 12.00)

Liputan6,Skandal Pengaturan Skor Guncang Kompetisi Basket Indonesia,  
<https://www.liputan6.com/bola/read/3170391/skandal-pengaturan-skor-guncang-kompetisi-basket-indonesia>, Diakses tanggal (16 November 2018 pukul 12.00)

Teknik Dasar Bola Basket,<https://gurupenjaskes.com/teknik-dasar-bolabasket>  
(diakses 3 maret 2019 pukul 21.00)

PERBASI, Sejarah Bola Basket di Indonesia, [www.perbasi.or.id](http://www.perbasi.or.id) (diakses tanggal  
15 November 2018 pukul 14.00)

Induk Organisasi Bola Basket Internasional,  
<http://www.tutorialolahraga.com/2015/07/induk-organisasi-bola-basket-internasional.html> (diakses 9 Maret 2019 Pukul 20.00)

FIBA, Integrity, <http://playershub.fiba.com/en/integrity/fair-play-and-betting/golden-rules-fair-play>, (diakses pada 21 Maret 2018 pukul 12.00)

Ken Foster, *Lex Sportiva* and *Lex Ludica*: the Court Of Arbitration for Sport's Jurisprudence,  
<https://www.entsportslawjournal.com/articles/10.16997/eslj.112/>,(diakses 13 April 2019 pukul 20.30)

Rosyidan, Akhirnya Surat itu Keluar (8 Pemain yang Terlibat Pengaturan Skor),  
<https://www.mainbasket.com/r/1324/akhirnya-surat-itu-keluar-8-pemain-ibl-yang-terlibat-pengaturan-skor> (diakses pada 9 Maret 2019 pukul 18.00)

Michael Teguh, PERBASI Ungkap Fakta-Fakta Pengaturan Skor IBL 2017,  
<https://www.antaranews.com/berita/666567/perbasi-ungkap-fakta-fakta-pengaturan-skor-ibl-2017> (diakses pada 24 April 2019 pukul 20.00)

Tanpa Nama, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum,  
<http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/>  
(diakses pada 11 Mei 2019 pukul 01.00)